

**KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

Heru Puji Suwito

NPP. 29.1125

*Asdaf Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur  
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: heru.pujisuwito@gmail.com

**ABSTRACT**

Report on the Implementation of Regional Government or LPPD is a report submitted by the Regional Government to the Central Government on the performance achievements of regional government administration and the implementation of co-administration tasks for one fiscal year. In the implementation of the preparation of this report, the performance of the state civil apparatus in the Regional Secretariat of the North Penajam Paser Regency was less than optimal due to the transition from conventional to online LPPD preparation, the absence of technical guidance, there were officials who were unfamiliar with online LPPD, poor network constraints, limited coordination due to the existence of pandemic and the absence of a special LPPD application. This research implements Robbins theory to measure performance. The research design used is descriptive qualitative with an inductive approach. Collecting data using interview techniques, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, it is known that the performance of the state civil apparatus in the preparation of the LPPD at the Regional Secretariat of the North Penajam Paser Regency has not been maximized. In practice, the drafting team has not been able to get data quickly due to data delays, no provisions and delays in technical instructions, there is no special LPPD application for North Penajam Paser Regency and there is no socialization or technical guidance for the drafting team. Efforts to overcome this problem are by picking up the ball related to data, coordinating regarding the determination and acceleration of technical instructions, innovation in making applications, and providing socialization or technical guidance. This research is expected to be an improvement over the less than optimal performance of the state civil apparatus in the preparation of the LPPD. The suggestions given by the researcher are that it is necessary to accelerate data collection, the need for strong coordination, the need for special LPPD applications, and the need for socialization or technical guidance for each LPPD drafting team.

**Keywords:** Performance, Civil Servants, Preparation of LPPD

## ABSTRAK

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD merupakan laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan ini, kinerja aparatur sipil negara pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang maksimal karena peralihan penyusunan LPPD konvensional ke *online*, tidak adanya bimbingan teknis, terdapat aparatur yang awam tentang LPPD online, kendala jaringan buruk, terbatasnya koordinasi karena adanya pandemi dan belum adanya aplikasi khusus LPPD. Penelitian ini mengimplementasikan teori Robbins untuk mengukur kinerja. Desain penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Berdasar hasil penelitian, diketahui bahwa kinerja aparatur sipil negara dalam penyusunan LPPD pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara belum maksimal. Dalam pelaksanaannya, tim penyusun belum bisa mendapatkan data dengan cepat karena keterlambatan data, ketidakadaan ketetapan serta keterlambatan petunjuk teknis, belum ada aplikasi LPPD khusus kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak adanya sosialisasi atau bimbingan teknis bagi tim penyusun. Upaya dari masalah tersebut yakni dengan jemput bola terkait data, koordinasi mengenai ketetapan serta percepatan petunjuk teknis, inovasi pembuatan aplikasi, serta pemberian sosialisasi atau bimbingan teknis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan atas kurang maksimalnya kinerja aparatur sipil negara dalam penyusunan LPPD. Saran yang diberikan peneliti yaitu perlu dilakukannya percepatan pengumpulan data, perlunya koordinasi yang kuat, perlunya aplikasi khusus LPPD, dan perlu diadakannya sosialisasi atau bimbingan teknis bagi setiap tim penyusun LPPD.

**Kata kunci:** Kinerja, ASN, Penyusunan LPPD

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan pemerintah daerah mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi serta tugas pembantuan. Tugas pemerintah daerah lewat kepala daerah salah satunya harus melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah pusat. Laporan tersebut berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau (LPPD) laporan yang disusun pemerintah daerah untuk dilaporkan dan disampaikan kepada pemerintah pusat setiap tahunnya sesuai tahun anggaran, berisi capaian kinerja serta pelaksanaan tugas pembantuan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyampaian LPPD dilakukan berjenjang Gubernur sebagai pemimpin daerah provinsi menyampaikan ke Presiden melalui perantara Menteri. Bupati maupun Wali kota menyampaikan melalui Gubernur untuk disampaikan ke Menteri sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat guna pembinaan terhadap pemerintah daerah. Pada prosesnya, LPPD dibuat dari awal mulai dari penyusunan hingga pengumpulan harus sistematis sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Untuk penyusunannya sendiri ketepatan waktu, kompetensi, keefektifan serta kefisiensian menjadi salah satu unsur tolok ukur penyusunan LPPD agar tercapai hasil sesuai target. Pada pelaksanaannya, Kementerian Dalam Negeri melalui tim evaluasi akan memberikan penilaian serta peringkat kepada pemerintahan daerah yang tepat waktu dalam pengumpulan LPPD serta dalam pencapaian hasil kinerja pemerintahannya dari segala aspek baik dan sesuai indikator capaian kinerja serta tugas pembantuan

yang diberikan pemerintah pusat ke daerah. Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 mencatatkan penilaian ataupun skor sangat tinggi dari hasil LPPD. Tahun 2019, provinsi Kalimantan Timur masuk kategori skor di atas rata-rata nasional berdasar dari capaian kinerja yang sesuai target serta penyusunan yang baik dan tepat waktu. Meningkatnya capaian hasil LPPD Provinsi Kalimantan Timur tahun ke tahun tidak luput dari kerja sama seluruh perangkat daerah yang terlibat salah satunya bupati ataupun wali kota pada penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten atau kota dibawah provinsi. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pernah meraih penghargaan dalam penyusunan LPPD bintang satu atau kategori sangat tinggi dan se-Indonesia menempati posisi 104 dari 397 kabupaten. Kunci dari keberhasilan tersebut yaitu upaya jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah khususnya tim penyusun LPPD kepada OPD atas laporan pertanggungjawabannya tepatnya pada tahun 2018. Pada era digitalisasi saat ini dalam penerapan *E-Government*, seluruh sistem informasi dan komunikasi pemerintahan dari jenjang pusat hingga daerah diberlakukan secara elektronik dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE ini juga diterapkan pemerintah dalam penyusunan LPPD pada tiap daerah provinsi maupun kabupaten atau kota guna pelaporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Dalam pelaksanaannya Kementerian Dalam Negeri selaku kementerian terkait mengenai LPPD membuat sistem *online* berupa *website* (<https://elppd.kemendagri.go.id>) guna memudahkan dalam penyusunan LPPD, dimana *website* ini hanya bisa diakses oleh tim penyusun LPPD itu sendiri. Adapun tim penyusun LPPD dibentuk dan ditetapkan oleh daerah masing-masing sesuai peraturan yang berlaku yang terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yaitu penerapan penyusunan LPPD yang telah menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yakni sistem *online* dengan berupa *website* <https://elppd.kemendagri.go.id> yang dimulai pada awal tahun 2021 ini bersamaan dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang masih mewabah hingga saat ini sehingga diberlakukan kebijakan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* bagi ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Beralihnya metode penyusunan LPPD dari konvensional ke *online* melalui *website* menjadikan kendala bagi ASN penyusunnya yakni kinerja yang menjadi kurang maksimal. Pada pelaksanaan penyusunan LPPD secara *online* perlu adanya bimbingan teknis atau sosialisasi bagi tim penyusun dan itu belum terlaksana akibat pandemi karena *website* tersebut baru dan masih banyak ASN yang awam. Penyusunan LPPD secara *online* juga memiliki kendala pada *bad signal* dalam prosesnya karena memerlukan data selular untuk menjalankannya. Seperti di daerah lainnya yang telah mempunyai aplikasi ataupun *website* daerah khusus penyusunan LPPD di provinsi maupun kabupaten atau kotanya, Kabupaten PPU belum memiliki aplikasi atau *website* tersebut dan sementara dalam proses perancangan serta pembuatan. Hakekatnya, aplikasi ini dapat memudahkan serta memberi efektivitas dan efisiensi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaporkan capaian kinerja serta tugas pembantuannya. Disamping belum adanya aplikasi yang juga memungkinkan dapat menguatkan juga koordinasi antara tim penyusun dan SKPD, dalam penyusunan saat ini koordinasi tersebut masih terbatas akibat pandemi. Hal itu semua ditambah dengan kebijakan WFH serta WFO pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU. Dari data Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten PPU tahun 2020 penyusunan dokumen LPPD untuk tahun 2019 sampai 2020 sesuai target namun dalam proses didalamnya sendiri terjadi serta terdapat kendala yang membuat kinerja ASN pada Bagian Pemerintahan dalam menyusun LPPD kurang maksimal.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks kinerja maupun konteks mengenai penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta laporan tersebut sendiri. Penelitian oleh Nurhasanah dkk dengan judul Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan metode deskriptif kualitatif adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Ilir sudah dilaksanakan dengan efektif, tetapi masih terdapat hambatan seperti SDM yang kurang memadai, kurangnya koordinasi penyusun dengan OPD terkait, waktu penyusunan singkat serta data OPD yang tidak atau belum tersedia. Kemudian penelitian oleh Henry Nelson dkk dengan judul Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan yang menggunakan metode deksriptif kualitatif adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah Penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai target dan tidak maksimal. Adapun hambatan seperti kurang koordinasi antar penyusun, belum adanya SOP penyusunan, belum diterapkannya reward dan punishment kepada tim penyusun, terbatasnya peralatan sebagai penunjang penyusunan LPPD dan SDM yang ada, serta kurang efektifnya informasi dan komunikasi antar OPD dengan tim penyusun. Selanjutnya penelitian oleh Dianinasita Windiningtyas dengan Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Siringan-Ringan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan metode deskriptif kualitatif menghasilkan hasil penelitian sebagai berikut yaitu Kinerja dari aparatur desa dari segi kuantitas baik terlihat dari dokumen, musyawarah, jam kerja, dan program pembangunan. Dari segi kualitas kinerja kurang baik karna kurangnya kerjasama, wawasan dan pengetahuan serta kemampuan. Begitu pula dengan ketepatan waktu yang belum baik dilihat dari segi pencairan dana desa yang lambat.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda serta belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengenai kinerja aparatur sipil negara dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, metode yang diimplementasikan yaitu menggunakan metode berdasar teori Robbins dalam melaksanakan penelitian yang memiliki dimensi yakni kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian dan komitmen kerja dengan indikator yang terdapat didalamnya masing-masing.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja, faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat aparatur sipil negara dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pendekatan induktif karena peneliti berharap dapat fokus pada pendeskripsian secara sistematis, objektif, serta logis terhadap permasalahan dilapangan agar dapat memahami fakta dan kebenaran yang muncul sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada. Untuk sumber data dalam pelaksanaannya data primer didapat dari pegawai yang telah diwawancarai, serta data sekunder didapat melalui dokumen, catatan, serta buku yang ada dilokus penelitian. Untuk informan memakai *purposive sampling* sebagai tekniknya. Adapun teknik yang diimplementasikan ini informan ditentukan dengan tolok ukur terlebih dahulu

yakni informan dianggap paling tahu serta penting dalam keadaan dilapangan. Informannya sendiri terdiri dari 16 orang terdiri dari Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum, arsiparis, pengadministrasi umum, pegawai bagian pemerintah sebagai kesatuan penyusun LPPD. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini pertama menggunakan teknik observasi dengan teknik *participant observation* dengan turun langsung ke lapangan, teknik wawancara dengan semi terstruktur lewat pedoman yang telah dibuat, serta dokumentasi.. dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik dari model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data/*data display*, serta *conclusion drawing/verification*.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai kinerja aparatur sipil negara dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan teori Robbins yang terdiri dari indikator sebagai berikut yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut ini.

#### 3.1. Kualitas

##### a. Kemampuan aparatur

**Tabel 1.**

Daftar Tim Penyusun LPPD Bagian Pemerintahan Berdasar Pendidikan Dan Pelatihan LPPD Yang Telah Dilakukan

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Tim Penyusun LPPD	Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan LPPD	
				Sudah	Belum
1.	Alam Prawira Negara, S.IP	Kepala Bagian	Koordinator	✓	
2.	Tamrin, SE	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	Penyusun	✓	
3.	Husuluddin	Pengadministrasi Umum	Penyusun	✓	
4.	Muhammad Nur Haswin, S.IP	Arsiparis	Penyusun		✓
5.	Adi Satrio Oetomo, SE	Pelaksana	Penyusun		✓
6.	Muhammad Salahudin, S.Kom	Pelaksana	Penyusun		✓

kinerja tim penyusun LPPD dilihat dari kualitas kerja yang berindikator kemampuan aparatur dalam menyusun LPPD itu telah baik dan masing-masing dari tim penyusun memiliki kemampuan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yakni belum terlaksanakannya bimbingan teknis serta lambannya petunjuk teknis dan juga kemampuan yang dinilai dari sudah atau belumnya pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh tim penyusun.

##### b. Keterampilan aparatur

**Tabel 2.**

## Daftar Tim Penyusun LPPD Bagian Pemerintahan Berdasar Jenjang Pendidikan dan Dasar Ilmu

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Tim Penyusun LPPD	Jenjang Pendidikan	Dasar Ilmu
1.	Alam Prawira Negara, S.IP	Kepala Bagian	Koordinator	Strata 1	Pemerintahan
2.	Tamrin, SE	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	Penyusun	Strata 1	Ekonomi
3.	Husuluddin	Pengadministrasi Umum	Penyusun	SMA	-
4.	Muhammad Nur Haswin, S.IP	Arsiparis	Penyusun	Strata 1	Pemerintahan
5.	Adi Satrio Oetomo, SE	Pelaksana	Penyusun	Strata 1	Ekonomi
6.	Muhammad Salahudin, S.Kom	Pelaksana	Penyusun	Strata 1	Komunikasi

kinerja ASN dalam penyusunan LPPD belumlah maksimal karena kendala dari pengumpulan data sehingga menghambat dalam proses penyusunan. Selain itu yang peneliti dapatkan bahwasanya tim penyusun yang dibentuk ini tidak semuanya memiliki *basic* atau dasar ilmu pada ilmu pemerintahan yang mana hal tersebut sangat penting bagi ASN karena dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selalu berkitik dengan hal yang bersinggungan dengan segala hal mengenai pemerintahan.

### 3.2. Kuantitas

#### a. Jumlah pekerjaan tugas

Kinerja ASN dalam penyusunan LPPD saat ini belum maksimal. Hal ini dapat dilihat walau dalam pengerjaannya jumlah pengerjaan tugas yang dilakukan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Namun pada prosesnya, mengenai kendala yang ada tidak lain yaitu keterlambatan data yang masuk pada IKK dari jumlah 32 SKPD. Ditambah juga berdasar tabel yang sebelumnya dari 32 SKPD tersebut, dengan komposisi tim penyusun yang terdiri hanya 6 (enam) orang saja yang mana mereka harus menyusun LPPD dari 32 SKPD dengan IKK yang berbeda-beda terlebih juga dengan pekerjaan lainnya selain menyusun LPPD dan juga *deadline* yang harus dipenuhi. Walaupun telah dibuat kelompok kerja untuk membantu tim penyusun LPPD, hal tersebut tetap tidak efektif dan tiap tahunnya masih tetap ada kendala yang sama. Perlu adanya program khusus yang harus mendampingi serta mengawasi khususnya dalam hal ini pengumpulan dari SKPD.

#### Tabel 3.

Daftar SKPD Beserta Penanggung Jawab Untuk Pelaporan Data Kepada Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

No.	Nama Instansi	Nama Penanggung Jawab
-----	---------------	-----------------------

(1)	(2)	(3)
1.	DPMPTSP	Nuri Ariwibowo, SE
2.	Satpol PP	Suherman, S.Sos
3.	Dinas Perhubungan	Andi Ruli Damayanti, A.Md
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Risandi Nurfiyanto, SE
5.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sisilia Andriana, S.Sos
6.	Dinas Perikanan	Novita Merda Santi, S.Pi
7.	Kesbangpol	Aleszender Widyantoro, S.Hut
8.	Dinas Ketahanan Pangan	Mustaha, SP
9.	Disdukcapil	Zaenal Arifin, S.Sos
10.	Dinas PUPR	Armiah, SE
11.	Dinas Kominfo	Andi Paisal, SE
12.	Dinas Pertanian	Muhammad Arif, SE
13.	Disnakertrans	Yan Tambaru Pailan, ST
14.	Inspektorat	Surmiatun
15.	RSUD Ratu Aji Putri Botung	Muh. Arsyad Arifin, SKM
16.	DPKP	Agus Bustomi
17.	Kecamatan Penajam	Widyanti, S.S
18.	Kecamatan Waru	Hijrah, A.Md
19.	Dinas Kesehatan	MARGaretha Toding, S.Kom
20.	Dinas BKPSDM	Erika Handayany, S.Psi
21.	Dinas Sosial	Paridawati
22.	BPBD	Nanny Oktaliawaty, SE
23.	DP3AP2KB	H. Sophian Achmad Rasyid, SKM, MM
24.	Kecamatan Sepaku	Sriwati Ningsih, A.Md
25.	Disdikpora	Muhammad Makmur Hasan
26.	Dinas KUKMPerindag	Edi Santoso
27.	Bapelitbang	Budi Setiawan, SH
28.	DPMD	Abd. Rahman, A.Md
29.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Andi Trisaldy
30.	Dinas Perkim	Sigit Sugiarti, S.STP
31.	Badan Keuangan	Mohammad Rizki Aditya
32.	Kecamatan Sepaku	Rudianto, S.Sos

b. Frekuensi dalam bekerja

ASN Bagian Pemerintahan yang tergabung di dalamnya mengenai frekuensi dalam bekerja pada hakekatnya tidak hanya mempunyai tugas dan fungsi menyusun LPPD saja namun mereka juga sebagai ASN Bagian Pemerintahan yang memiliki tugas lain selain menyusun LPPD dengan berbagai tahapan yang dilaksanakan yang mana dalam prosesnya banyak terdapat kendala sehingga hal tersebut mengakibatkan kinerja ASN Bagian Pemerintahan khususnya tim penyusun LPPD menjadi belum maksimal.

### 3.3. Ketepatan Waktu

a. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas serta pengumpulan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

Mengenai ketepatan waktu tim penyusun LPPD di Bagian Pemerintahan berjalan dengan baik karena pada pelaksanaannya dari tahun ke tahun tidak pernah ada keterlambatan dalam pengumpulannya. Namun, dalam proses penyusunan yang dilakukan oleh tim penyusun, mereka harus meningkatkan intensitas waktunya dalam bekerja agar tepat waktu salah satunya dengan memperlama jam kerja atau lembur, hal tersebut memiliki pengaruh pada individu karena dapat berimbas pada kinerja yang harus menambah waktu pada jam kerjanya. Ditambah dengan pembagian *shift* kerja saat WFH dan WFO pada Bagian Pemerintahan, yang tidak memberikan keleluasaan seperti yang dapat diberikan pada saat bekerja dikantor secara keseluruhan terutama dalam hal koordinasi.

b. Manajemen waktu saat pelaksanaan dalam mengerjakan tugas

Dalam indikator manajemen waktu ini belum maksimal. Ini dapat dilihat dari kendala utama yakni lambatnya data yang masuk untuk diinput dalam LPPD, serta dilihat dari tabel yang memperlihatkan peringkat pada tingkat provinsi yang menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020.

**Tabel 4.**

Peringkat Hasil LPPD Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Tingkat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Peringkat
1.	2019	3
2.	2020	5
3.	2021	-

### 3.4. Efektivitas

a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas

Efektivitas dari penggunaan teknologi informasi guna membantu dalam pengerjaan tugas masih belum maksimal yang dilihat dari kendala atau masih belum optimalnya aplikasi melalui *website* E-LPPD karena masih banyak fitur yang kurang lengkap untuk mendukung berjalannya penyusunan LPPD dan untuk saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara belum memiliki sistem teknologi informasi khusus LPPD, kalau dilihat dari daerah lainnya sebenarnya sudah banyak yang menerapkannya.

b. Sarana dan prasarana

**Tabel 5.**

Sarana Dan Prasarana Kantor Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

No.	Hal Yang Diamati	Jumlah	Keterangan
1.	PC/Komputer	15 Unit	10 Bagus, 4 Sedang, 1 Tidak Bagus
2.	Laptop	5 Unit	2 Bagus, 3 Sedang
3.	Printer	3 Unit	2 Sedang, 1 Tidak Bagus
4.	Mesin ketik	1 Buah	Tidak Bagus
5.	Almari arsip	3 Buah	2 Sedang, 1 Tidak Bagus
6.	Meja kursi tamu	2 Set	Sedang
7.	Meja kursi kerja Kepala Bagian	1 Set	Sedang
8.	Meja kursi kerja Kepala Sub Bagian	3 Set	Sedang
9.	Meja kursi kerja staf	14 Set	12 Sedang, 2 Tidak Bagus

10.	Meja kursi rapat/hadap pimpinan	1 Set	Sedang
11.	Filling kabinet	1 Buah	Sedang
12.	Gambar burung garuda dan foto presiden	2 Pasang	Sedang
13.	Dispenser	2 Buah	Sedang
14.	Kendaraan Dinas	1 Unit	Sedang

Berdasar indikator ini dapat disimpulkan bahwa kinerja ASN tim penyusun LPPD kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang dan guna penyusunan LPPD ini perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan walaupun juga harus disesuaikan dengan keadaan terutama pandemi saat ini agar kinerja ASN selaku tim penyusun LPPD dapat maksimal nantinya karena kedua hal tersebut sangat terkait dan mempengaruhi.

### 3.5. Kemandirian

a. Dorongan kepada diri sendiri untuk melakukan pekerjaan

**Tabel 6.**

Kehadiran Tim Penyusun LPPD Bagian Pemerintahan Dalam Kegiatan Rapat LPPD Tahun 2020

No.	Kegiatan	Jumlah Tim Penyusun Bagian Pemerintahan	Jumlah Kehadiran		Keterangan
			Hadir	Tidak Hadir	
1.	Rapat Tahapan Persiapan Penyusunan LPPD	6 Orang	6	-	-
2.	Rapat Tahapan Penyusunan	6 Orang	6	-	-
3.	Rapat Tahapan Persiapan Pengumpulan LPPD	6 Orang	6	-	-
4.	Rapat Bersama Kelompok Kerja Dan SKPD	6 Orang	6	-	-

Berdasar indikator ini dan didukung oleh data berupa tabel kehadiran bahwa kinerja ASN selaku tim penyusun LPPD sudah baik dan maksimal. Hal tersebut dilihat dari tidak adanya hambatan terhadap dorongan kerja serta dibuktikan juga dengan tabel kehadiran setiap kegiatan rapat LPPD yang mana seluruh anggota tim penyusun selalu aktif dalam setiap kegiatan dalam hal penyusunan LPPD ini yang artinya mereka memiliki dorongan untuk bekerja karena tanggung jawab yang memang mereka emban selaku tim penyusun LPPD.

### 3.6. Komitmen Kerja

a. Semangat dalam bekerja atau melaksanakan tugas,

Indikator semangat kerja tidak ada hambatan. Artinya kinerja ASN tim penyusun dalam penyusunan LPPD pada dimensi komitmen kerja indikator semangat kerja sudah baik dan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat terhadap semangat dalam bekerja menyusun LPPD tanpa adanya hambatan ditambah honor yang disajikan dibawah ini yang diberikan dan telah dianggarkan sebagai bukti untuk memberikan *reward* berupa insentif kepada tim penyusun LPPD.

**Tabel 7.**

### Jumlah Honor Yang Didapatkan Tim Penyusun LPPD

No.	Kegiatan	Satuan	Volume	Jumlah Honor Per Orang
1.	Honor Penyusun Materi Penyusunan Lppd	Dokumen	1	750.000,00
2.	Rapat Internal Lppd	Kegiatan	3	50.000,00
3.	Rapat Bersama Kelompok Kerja Dan Skpd	Kegiatan	1	100.000,00
4.	Bimbingan Teknis	Kegiatan	1	500.000,00
Jumlah			10	1.400.000,00

b. Tanggung jawab dalam bekerja atau melaksanakan tugas.

**Tabel 8.**

Pencapaian Sasaran Penyusunan LPPD Pada Bagian Pemerintahan Berdasarkan LKIP Tahun 2021

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020 (%)	2021			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2021 Terhadap 2023 (%)
		Target	Realisasi	(%) Realisasi		
Tersusunnya Dokumen LPPD dan RLPPD	100	2 dok	2 dok	100	2 dok	100

Berdasar indikator tanggung jawab dilihat dari pencapaian sasaran penyusunan LPPD pada Bagian Pemerintahan yang bersumber dari LKIP, seluruh pencapaian dalam penyusunan memiliki presentase seluruhnya 100%. Dapat dikatakan tim penyusun LPPD telah bertanggung jawab atas tugas yang telah diemban mereka

### 3.7. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dari penelitian ini setelah dianalisis dengan teori Robbins yakni sebagai berikut.

- Keterlambatan data yang masuk selalu menjadi kendala yang sering terjadi saat penyusunan LPPD. Padahal dari Bagian Pemerintahan telah membuat pokja yang menaungi SKPD-SKPD namun kendala tersebut masih saja terjadi. Perlu adanya program yang memang dapat memaksimalkan kinerja dalam penyusunan ini, koordinasi yang kuat serta pengawasan yang lebih ketat kepada SKPD agarnya dapat membantu tim penyusun dapat dengan mudah menyusun LPPD.
- Ketidakadaan ketetapan serta keterlambatan petunjuk teknis (juknis) penyusunan LPPD, terkait ketidaktepatan waktu perilisan atau disebarkannya oleh pusat mengenai petunjuk teknis ini serta tidak adanya petunjuk teknis yang tetap karena setiap tahunnya dapat berubah. Sesuai Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 telah jelas diterangkan teknis serta waktu penyusunan namun dalam setiap pelaksanaannya dari pusat belum ada kepastian terkait hal tersebut. Mengenai ketidakadaan ketetapan petunjuk teknis bagi tim penyusun LPPD yang mana petunjuk teknis yang diberikan pusat berubah-ubah isinya termasuk IKK (Indikator Kinerja

Kunci) yang menjadi data kunci dalam LPPD yang nantinya akan dianalisis serta *diinput* tim penyusun.

- c. Belum adanya aplikasi LPPD khusus Kabupaten Penajam Paser Utara, kalau hanya mengandalkan dari aplikasi *website* E-LPPD itu tidak akan maksimal terutama permasalahan utama tim penyusun ada pada keterlambatan data dari SKPD, memang diperlukan inovasi dari pemerintah daerah untuk membuat aplikasi khusus LPPD untuk Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkesinambungan dengan E-LPPD yang dapat membantu tugas-tugas dalam penyusunan LPPD.
- d. Tidak adanya sosialisasi atau bimbingan teknis (bimtek) bagi penyusun LPPD memang tidak dilaksanakan berhubungan juga dengan pandemi. Namun dalam pelaksanaan penyusunannya dikarenakan bimbingan teknis itu sudah lama tidak dilakukan, maka sangat berpengaruh terlebih dengan adanya petunjuk teknis karena kedua hal ini sangat terkait.

### **3.8. Upaya**

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pada penelitian ini dari permasalahan yang ada setelah dianalisis dengan teori Robbins sebagai berikut.

- a. Jemput bola untuk mempercepat data yang masuk, sebagai upaya mengatasi keterlambatan data yang masuk guna mempercepat data yang harus *diinput* oleh tim penyusun. Tim penyusun bersama pokja harus turun langsung menekan SKPD.
- b. Koordinasi yang kuat guna ketetapan dan mempercepat keluarnya petunjuk teknis (juknis), secara intens dan terus menerus kepada pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang mengampu terkait LPPD seluruh daerah yang ada di Indonesia mengenai ketetapan petunjuk teknis serta mempercepat keluarnya petunjuk teknis.
- c. Inovasi pembuatan aplikasi LPPD khusus Kabupaten Penajam Paser Utara, yang mana hampir sama dengan aplikasi melalui *website* E-LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri yang telah dipakai hingga saat ini namun dengan fitur lebih lengkap dan secara terintegrasi dapat terhubung untuk memberikan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyusunan terutama dalam *penginputan* data dari SKPD dan Kementerian Dalam Negeri
- d. Memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis (bimtek) bagi penyusun LPPD, setiap tahunnya agar memaksimalkan kemampuan serta keterampilan ASN dalam menyusun LPPD sehingga LPPD yang dihasilkan juga dapat memberikan hasil maksimal dan terbaik dalam penilaiannya nanti terutama bagi Kepala Daerah serta daerah tersebut.

### **3.9. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mengenai kinerja aparatur sipil negara dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana berfokus pada kinerja aparatur sipil negara dalam proses penyusunannya, sebagaimana diketahui kinerja secara keseluruhan masih kurang efektif dilihat dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu serta efektivitas dan untuk kemandirian serta komitmen kerja sudah tergolong baik. Berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dkk yang melakukan penelitian berfokus pada efektivitas dalam penyusunan LPPD yang mana secara kesimpulan sudah efektif namun secara keseluruhan yang sudah efektif tersebut masih terdapat hambatan yang terjadi seperti SDM yang kurang memadai, kurangnya koordinasi penyusun dengan OPD terkait, waktu penyusunan singkat serta data OPD yang tidak atau belum tersedia. Untuk hambatan pada penelitian yang dilakukan peneliti sebagaimana terdapat hambatan yaitu keterlambatan data yang masu, ketidakadaan ketetapan serta keterlambatan petunjuk teknis (juknis) penyusunan LPPD, belum adanya aplikasi LPPD khusus Kabupaten Penajam Paser Utara, dan tidak adanya sosialisasi atau bimbingan teknis (bimtek) bagi penyusun LPPD sebagaimana juga terdapat pada penelitian oleh Henri Nelson Dkk yang mana hambatan yang terjadi

yakni kurang koordinasi antar penyusun, belum adanya SOP penyusunan, belum diterapkannya reward dan punishment kepada tim penyusun, terbatasnya peralatan sebagai penunjang penyusunan LPPD dan SDM yang ada, serta kurang efektifnya informasi dan komunikasi antar OPD dengan tim penyusun yang mana penelitian ini berfokus pada implementasi LPPD itu sendiri yang hasil penelitiannya terbilang belum sesuai dengan target dan tidak maksimal. Kemudian upaya pada penelitian ini untuk mengatasi hambatan yang ada dengan melakukan jemput bola, koordinasi yang kuat dan intens, membuat aplikasi khusus LPPD Kabupaten Penajam Paser Utara serta memberikan bimbingan teknis (bimtek) atau sosialisasi kepada tim penyusun LPPD. Melihat upaya untuk mengatasifaktor penghambat tersebut dari kinerja aparatur sipil negara dalam penyusunan LPPD penelitian oleh Dianinasita Windiningtyas yang juga meneliti mengenai kinerja dalam hal ini kinerja aparatur dalam penyusunan APBDes pada masalah yang terjadi adapun upaya yang dilakukan hampir kurang lebih sama dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan ketepatan waktu serta kualitas aparatur yang harus ditingkatkan dari permasalahan segi kualitas kinerja kurang baik karna kurangnya kerjasama, wawasan dan pengetahuan serta kemampuan. Begitu pula dengan ketepatan waktu yang belum baik dilihat dari segi pencairan dana desa yang lambat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kinerja aparatur sipil negara dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur berdasar Teori Robbins dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu serta efektivitas belum maksimal sedangkan dimensi kemandirian dan komitmen kerja kerjanya sudah tergolong baik. Adapun faktor penghambat nya yaitu keterlambatan data yang masuk, ketidakadaan ketetapan serta keterlambatan petunjuk teknis (juknis) penyusunan LPPD, belum adanya aplikasi LPPD khusus Kabupaten Penajam Paser Utara, dan tidak adanya sosialisasi atau bimbingan teknis (bimtek) bagi penyusun LPPD. Serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut ialah dengan jemput bola untuk mempercepat data yang masuk, koordinasi yang kuat guna ketetapan dan mempercepat keluarnya petunjuk teknis (juknis), inovasi pembuatan aplikasi LPPD khusus Kabupaten Penajam Paser Utara, dan memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis (bimtek) bagi penyusunan LPPD.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang sempit serta dan biaya dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus Bagian Pemerintahan sebagai pengampu dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis sadar bahwa penelitian ini yang masih awal, oleh karena itu penulis menyarankan serta menginginkan agar dapat dilaksanakannya penelitian lanjutan pada lokus yang serupa terkait dengan kinerja aparatur sipil negara dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum beserta jajarannya di seluruh Bagian Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta juga kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M.A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ardios. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications Ltd.
- Mahsun, Mohammad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Jogjakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- MT, Bintoro dan Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Nawawi, Hadari. 2017. *Perencanaan SDM untuk Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Neuman, W.L. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.
- Nursapiah. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Raihan, 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Samsu, 2017. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Bandung: Kencana.
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Surat Edaran Nomor 061.2/756/TU-Pimp/142/Ortal tentang Pemberlakuan Tugas Kedinasan di Rumah (WFH) di Kabupaten Penajam Paser Utara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Arsip Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022
- LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021
- Wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Anggota Tim Penyusun LPPD Bapak Alam Prawira Negara, S. IP pada tanggal 03 Januari 2022
- Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Anggota Tim Penyusun LPPD Bapak Tamrin, SE pada tanggal 03 Januari 2022
- Wawancara dengan Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Anggota Tim Penyusun LPPD Bapak Husuluddin pada tanggal 03 Januari 2022
- Wawancara via *WhatsApp* dengan Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Anggota Tim Penyusun LPPD Bapak Muhammad Haswin Rahardi, S. IP pada tanggal 26 Agustus 2021

<https://kaltim.antaranews.com/berita/103678/laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-provinsi-kaltim-2020>. Kamis, 2 September 2021

<https://kaltim.antaranews.com/berita/45912/pemkab-penajam-raih-penghargaan-bintang-satu-lppd>. Jumat, 3 September

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/09/09/kemendagri-apresiasi-kinerja-pemda-kaltim-di-atas-rata-rata-nasional-ini-hasil-lppd-nya>. Kamis, 2 September 2021

<https://kaltimprov.go.id/berita/ringkasan-lppd-2020-untuk-masyarakat>, Jumat, 3 September 2021

<https://www.linkeupemda.com/bimtek-sosialisasi-sistem-informasi-e-lppd-dan-e-eppd-dan-rencana-integrasi-dalam-sistem-informasi-pembangunan-daerah/>. Minggu, 27 Maret 2022

Henry Nelson Momuat, Jetty E.H Mokat, Fitri H. Mamonto. 2020. *“Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan”*. Jurnal, Minahasa Selatan: Universitas Negeri Manado.

Nurhasanah, Nurmah Semil, & Taufik Akhyar. 2020. *“Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir”*. Jurnal Administrasi Publik Volume 25, Palembang: SPISIPOL Candradimuka.

Windiningtyas, Dianinasita. 2018. *“Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Siringan-Ringan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun”*. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.

